

**RESPON PEMERINTAH DAN DPR PADA POLEMIK UU MD3  
(Analisis Strategi Respon Krisis Situasional pada Harian Kompas  
Edisi Februari-April 2018)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

**Oleh:**

**RITMIKA SERENADY**

**L 100 140 022**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **RESPON PEMERINTAH DAN DPR PADA POLEMIK UU MD3 (Analisis Strategi Respon Krisis Situasional pada Harian Kompas Edisi Februari-April 2018)**

## **PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**RITMIKA SERENADY**

**L 100 140 022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**Dr. Dian Purworini**

**NIK. 1102**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**RESPON PEMERINTAH DAN DPR PADA POLEMNIK UU MD3**

**(Analisis Strategi Respon Krisis Situasional pada Harian Kompas Edisi  
Februari-April 2018)**

**OLEH**  
**RITMIKA SERENADY**  
**L 100 140 022**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Komunikasi dan Informatika  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jumat, 28 Desember 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Dr. Dian Purworini**  
**(Ketua Dewan Penguji)**
2. **Agus Triyono, M.Si**  
**(Anggota I Dewan Penguji)**
3. **Budi Santoso, M.Si**  
**(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)

(.....)

(.....)



**Dekan,**

**Dr. Nurgiyatna, S.T., M.Sc.**  
**NIK. 881**

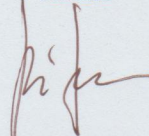
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Publikasi Ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Nopember 2018

Penulis



**RITMIKA SERENADY**

**L100140022**



**RESPON PEMERINTAH DAN DPR PADA POLEMIK UU MD3**  
**(Analisis Strategi Respon Krisis Situasional pada Harian Kompas Edisi**  
**Februari-April 2018)**

**Abstrak**

Perusahaan maupun organisasi dalam praktiknya tidak bisa terhindar dari ancaman krisis. Untuk itu, perusahaan maupun organisasi perlu menyiapkan persenjataan seperti kata-kata dan pesan kunci jauh sebelum krisis datang. Salah satu organisasi yang tak terhindarkan dari ancaman krisis adalah pemerintah dan DPR Republik Indonesia, di mana polemik UU MD3 yang terjadi di awal tahun 2018 itu bisa mengancam reputasi kedua lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi respon krisis pemerintah dan DPR pada polemik UU MD3 melalui analisis isi kuantitatif pada pemberitaan Harian *Kompas* periode Februari-April 2018. Kategorisasi pada *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) digunakan sebagai acuan mengukur tanggung jawab pemerintah dan DPR dalam merespon krisis. Dari analisis sebanyak 39 berita, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara strategi respon yang diterapkan pemerintah dan DPR dengan situasi krisis yang terjadi. Pemerintah dan DPR dominan menggunakan strategi respon krisis *diminish*. Sedangkan menurut pedoman strategi respon SCCT, situasi krisis seperti yang terjadi pada polemik UU MD3 akan lebih efektif dikendalikan dengan strategi respon krisis *rebuild*.

**Kata Kunci:** Krisis, SCCT, UU MD3, Analisis Isi

**Abstract**

Companies and organizations in practice cannot avoid from the threat of a crisis. For this reason, companies and organizations need to prepare weapons such as words and key messages long time before the crisis comes. One organization that is inevitable from the threat of the crisis is the Indonesian government and parliament, where the polemic of the MD3 Law that occurred in early 2018 could threaten the reputation of the government. The purpose of this study is to determine the government and parliament's crisis response strategy toward the polemic of the MD3 Law through quantitative content analysis on the *Kompas* Daily news on February-April 2018 period. The categorization in *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) is used as a reference to measure government responsibility in responding to a crisis. From the analysis of 39 news, researchers found a discrepancy between the response strategy applied by the government and the crisis situation. The government and parliament dominantly used diminish crisis response strategies. Meanwhile according to the guidelines of the SCCT response strategy, a crisis situation such as what happened to the polemic of the MD3 Law would be more effectively controlled by a crisis response rebuild strategy.

**Keywords:** Crisis, SCCT, MD3 Law, Content Analysis

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam menjalankan tugasnya, semua institusi berharap dapat berjalan sesuai dengan rencana dan visi misi yang telah disusun. Namun, dalam praktiknya, tidak ada institusi yang bisa terhindar dari kemungkinan datangnya musibah yang mampu mengancam eksistensi institusi tersebut. Musibah dan hal-hal buruk pada akhirnya dapat berubah menjadi krisis.

Fearn-banks (2011) menuliskan bahwa dampak dari terjadinya krisis tidak lain melekat pada nama baik institusi, di samping itu juga memengaruhi persepsi publik terhadap produk maupun jasa dari institusi tersebut. Tidak ada satupun institusi mampu memprediksi datangnya krisis sehingga bisa menghindarinya. Untuk itu, institusi perlu menyiapkan persenjataan, seperti kata-kata dan pesan kunci yang seharusnya disediakan jauh sebelum krisis datang (Suparmo, 2011).

Dalam hal ini, praktisi humas perlu memahami pentingnya peran media dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, institusi harus memulai untuk menjalin strategi kerjasama dan komunikasi yang baik dengan media, bahkan sejak belum terjadi krisis. Wijayanto & Purworini (2018) menggarisbawahi bahwa secara ideal, humas memiliki peran penting dalam mengelola komunikasi melalui media. Reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi sangat bergantung pada informasi yang beredar di media dan jenis interpretasi yang diberikan publik terhadap informasi tersebut.

Manuel Castells (Puspitasari, 2016) memaparkan bahwa sebagian besar warga negara di seluruh dunia tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah maupun parlemennya sendiri. Dari hasil sebuah penelitian memperkuat fakta ini bahwa sebanyak 63% responden yang berasal dari 18 negara memiliki persepsi bahwa negara mereka dijalankan oleh sekelompok orang yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan bangsa dan negaranya. Data tersebut menunjukkan adanya krisis legitimasi yang terjadi dalam tubuh pemerintah dan bisa mengancam keberlangsungan pemerintah dalam konteks tata kelola yang baik.

Fenomena global ini juga sedang menimpa pemerintah dan DPR RI. Pemerintah dan DPR tengah diguncangkan dengan pemberitaan mengenai Revisi

UU MD3. Pada 12 Februari 2018, DPR melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPR Fadli Zon, resmi mengesahkan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Disahkannya revisi ini menimbulkan pertentangan dari banyak pihak lantaran beberapa pasalnya dinilai antikritik dan hanya bagi-bagi kekuasaan. Misalnya, Pasal 122 huruf k menyebutkan bahwa MKD diperbolehkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR, baik lembaga maupun perseorangan. Pasal ini oleh banyak orang dikhawatirkan dapat menimbulkan ketimpangan hukum dan mempermudah DPR untuk mengkriminalkan warga negara.

Subhan (2018) menyebut revisi UU MD3 ini sebagai monster demokrasi. Saat DPR mengambil langkah hukum terhadap siapapun yang merendahkan kehormatan pihaknya sebagaimana revisi Pasal 122, hal itu sesungguhnya merupakan kemunduran paling fatal termasuk dalam pemikiran politik. Selain itu, hak DPR perihal pemaksaan pemanggilan orang dengan tangan kepolisian (seperti revisi Pasal 73) dirasa bukan lagi wewenang legislatif, melainkan yudikatif. Ini merupakan sebuah kekacauan dalam Trias Politica.

Sementara itu, dari sisi hukum menurut Robikin Emhas (Sahal, 2018), ketentuan dalam revisi UU MD3 melampaui batas kewenangan yang seharusnya dan berpotensi menimbulkan *abuse of power*. Selain itu, dari segi *cek and balance*, dinilai berpotensi mengkriminalisasi pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan politik parlemen.

Efek dari pemberitaan revisi UU MD3 yang dilancarkan media menimbulkan berbagai macam pergerakan sosial di masyarakat, mulai dari demonstrasi di berbagai daerah, adanya kecaman sebanyak 117.941 orang melalui petisi di laman *Change.org*, dan munculnya dua mahasiswa sebagai pemohon dalam sidang perdana uji materi terhadap UU MD3 di Mahkamah Konstitusi. Semua gerakan tersebut merupakan bentuk protes terhadap UU MD3.

Berkaitan dengan realita tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui respon komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah dan DPR melalui berita yang dipublikasikan oleh media massa. Peneliti mengacu pada teori *situational crisis communication theory* (SCCT) untuk mengetahui strategi respon tersebut.

Penelitian serupa dengan menggunakan teori SCCT pernah dilakukan oleh Baycu & Kilinc (2017) dengan judul *Analysis of Volkswagen Emission Crisis in the Context of Crisis Response Strategies and Newspapers Framing*.

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi untuk menganalisis sebanyak 29 *press release* pada situs internasional Volkswagen dengan kategori yang mengacu pada teori SCCT, dan sebanyak 116 berita di surat kabar Turki dengan kategori yang mengacu pada *tone of the news stories*. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pemberitaan yang terdapat pada *press release* menunjukkan perusahaan banyak menggunakan strategi *corrective action* dalam menanggapi dampak buruk dari krisis, sedangkan pada surat kabar di Turki sebagian besar menyajikan berita terkait krisis secara negatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi respon krisis pemerintah dan DPR pada polemik UU MD3 dalam pemberitaan surat kabar *Kompas* periode Februari-April 2018. Surat kabar *Kompas* dipilih hanya sebagai perantara yang memuat respon pemerintah terhadap polemik UU MD3. Penelitian ini tidak ada kaitannya dengan politik media. Sedangkan edisi Februari-April 2018 dipilih karena dalam kurun waktu tersebut krisis tengah mencapai tahap akut, di mana reaksi mulai bermunculan dan isu menyebar luas. Dalam tahap ini sangat bergantung pada aktor yang mengendalikan krisis (Fajar, 2011).

## **1.2 Telaah Pustaka**

### **1.2.1 Situational Crisis Communication Theory**

*Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) merupakan teori respon krisis yang digagas oleh W. Timothy Coombs. Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami bagaimana melindungi reputasi secara maksimal yang dapat diberikan melalui komunikasi pascakrisis. Reputasi secara umum dimaknai sebagai aset organisasi yang berharga (Wilcox & Cameron, 2009). Aset reputasi tersebut dapat menarik *stakeholder* untuk menanamkan kepercayaan mereka terhadap organisasi.

Coombs (2007) dalam penelitiannya menekankan bahwa SCCT merupakan perkembangan dari teori atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana memprediksi ancaman reputasi yang diakibatkan oleh krisis dan bagaimana



menentukan strategi respon krisis dalam melindungi reputasi. SCCT secara garis besar mengemukakan bahwa dengan memahami situasi krisis, manajer krisis dapat menentukan strategi respon krisis yang mampu melindungi reputasi organisasi secara tepat. Teori ini memperlihatkan adanya hubungan teoritis antara situasi krisis dan strategi respon krisis. Dalam SCCT, tanggung jawab merupakan hal penting saat menghadapi krisis.

Setiap tindakan membutuhkan pertanggungjawaban dan organisasi harus bisa mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam situasi ini, strategi respon krisis bisa dijadikan sebagai jalan keluar bagi organisasi. Strategi respon krisis SCCT dibuat berkaitan dengan tanggung jawab dalam sebuah krisis yang terjadi. Coombs menemukan bahwa strategi respon krisis SCCT utama terdiri dari tiga kelompok berdasarkan persepsi penerimaan tanggung jawab untuk sebuah krisis dan satu kelompok pendukung.

Tabel 1. Strategi respon krisis SCCT

| <b>STRATEGI RESPON KRISIS SCCT</b>  |
|---|
| Strategi Respon Krisis Penolakan ( <i>Deny</i> )<br>1) <i>Attack the accuser</i> : menuduh orang atau kelompok tertentu yang mengklaim bahwa ada masalah dengan organisasi<br>2) <i>Denial</i> : menegaskan bahwa tidak ada krisis<br>3) <i>Scapegoat</i> : menyalahkan orang atau kelompok tertentu atas krisis yang terjadi |
| Strategi Respon Krisis Pengurangan ( <i>Diminish</i> )<br>4) <i>Excuse</i> : meminimalkan tanggung jawab organisasi dengan menunjukkan ketidakmampuan untuk mengendalikan krisis<br>5) <i>Justification</i> : meminimalisir kerusakan yang diakibatkan oleh krisis  |
| Strategi Respon Krisis Membangun Kembali ( <i>Rebuild</i> )<br>6) <i>Compensation</i> : menawarkan kompensasi/bantuan kepada korban<br>7) <i>Apology</i> : organisasi bertanggungjawab atas krisis dan meminta maaf kepada <i>stakeholder</i>   |
| Strategi Respon Krisis Pendukung ( <i>Bolstering</i> )<br>8) <i>Reminder</i> : mengingatkan kepada <i>stakeholder</i> tentang karya bagus organisasi<br>9) <i>Ingratiation</i> : memuji <i>stakeholder</i> yang berkaitan dengan krisis<br>10) <i>Victimage</i> : mengatakan bahwa organisasi menjadi korban atas krisis      |

Sumber: (Coombs, 2007)

Sepuluh strategi respon krisis SCCT tersebut yang akan digunakan peneliti sebagai kategori dalam acuan mengukur tanggung jawab pemerintah dan DPR dalam merespon krisis pada kasus UU MD3. Kasus ini dengan cepat bergulir di media sehingga menimbulkan polemik dan pada akhirnya menjadi krisis. Krisis ini bisa menjadi ancaman bagi reputasi pemerintah karena publik akan

menemukan penyebab krisis melalui media, sehingga mereka akan melakukan penilaian yang bisa memengaruhi kepercayaan mereka terhadap pemerintah dan parlemennya.

Kriyantono, Riani, & Ika (2017) dalam penelitiannya pernah menggunakan SCCT sebagai landasan teori dalam menganalisis praktik humas di Indonesia. Penelitian tersebut berfokus pada publik sehingga bertujuan untuk menyelidiki peran media massa dalam menciptakan reaksi dan penilaian publik terhadap krisis aliran lumpur Lapindo di Sidoarjo. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada pendekatan yang berpusat pada organisasi (pemerintah). Sehingga SCCT yang berinti pada tanggung jawab krisis dapat menjelaskan dalam penelitian ini mengenai bagaimana pemerintah memosisikan diri terkait tanggung jawab etis saat terjadi krisis pada kasus UU MD3.

Untuk mendapatkan interpretasi positif, pemerintah dan DPR harus memenuhi harapan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholder*). Kegagalan dalam memenuhi harapan masyarakat akan menjadi masalah bagi pemerintah karena pada dasarnya reputasi dipengaruhi oleh bagaimana para pemangku kepentingan mengevaluasi kemampuan sebuah organisasi dalam memenuhi ekspektasi mereka (Coombs, 2007). Ketika pemerintah dan DPR memilih untuk tidak bertanggung jawab, maka pemerintah akan memusatkan perhatian pada reputasi organisasi yang mereka pimpin dalam melakukan komunikasi krisis.

Namun, akan menjadi lebih etis jika pemerintah dan DPR memulai usaha mereka dengan menggunakan komunikasi untuk mengatasi masalah fisik dan psikologi masyarakat. Setelah hasil dari usaha ini berhasil, maka pemerintah baru bisa mengalihkan perhatian mereka ke aset-aset reputasi. Karena prioritas utama dalam krisis bukan untuk melindungi reputasi organisasi, melainkan untuk melindungi para pemangku kepentingan dari bahaya. Penguasaan terhadap situasi krisis yang baik dan pemilihan strategi respon krisis yang tepat dapat meringankan beban fisik dan psikologis masyarakat serta melindungi aset reputasi pemerintah beserta parlemen karena SCCT memberikan panduan normatif bagi organisasi mengenai bagaimana komunikasi yang efektif dapat digunakan selama krisis.

### **1.2.2 Dampak Krisis UU MD3 dan Tanggung Jawab Sosial Humas**

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara konseptual menganut dan mengimplementasikan prinsip negara hukum. Prinsip tersebut berarti bahwa semua komponen baik pejabat negara maupun warga negara dalam setiap tindakan harus berdasarkan aturan hukum yang telah berlaku (Tobing, 2015). Namun, kendala yang sering terjadi ialah aturan hukum yang dijadikan landasan dalam setiap bertindak belum cukup ideal untuk diterapkan, seperti misalnya aturan tersebut belum mengedepankan asas kerukunan dan keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

Peraturan hukum yang sempat menjadi polemik dan menjadi sorotan publik karena dianggap tidak mengedepankan asas di atas terjadi di Indonesia baru-baru ini pasca disahkannya revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3). Revisi undang-undang yang baru disahkan pada 12 Februari 2018 ini berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat dan bisa menjadi krisis yang mengancam eksistensi pemerintah dan DPR. Revisi yang awalnya disusun untuk mengatur penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR justru meluas dan memunculkan pasal-pasal yang menuai kontroversi. Dalam berita yang ditulis oleh Kristanto (2018) pada harian *Kompas*, revisi UU MD3 berpotensi menghambat kemerdekaan pers, menimbulkan konflik antarlembaga negara, dan mengancam demokrasi.

Dalam kaitannya dengan profesi kehumasan, situasi krisis yang berlangsung saat ini menimbulkan pertanyaan, apakah kehumasan masih dapat diharapkan dalam meminimalisasi dampak krisis terhadap kelangsungan hidup organisasi? Menjawab pertanyaan tersebut harus dimulai dari pembahasan terhadap urusan utama para praktisi humas, yaitu membangun kepercayaan dan meraih dukungan publik terhadap organisasi. Di belakang urusan utama itu terdapat asumsi bahwa sebuah organisasi hidup dan berkembang berkat kepercayaan dari publik yang harus dibayar dengan sikap tanggung jawab sosial (Chatra & Nasrullah, 2008).

Ada atau tidaknya kepercayaan, menentukan apakah sebuah organisasi dapat meneruskan kehidupannya atau harus berhenti karena kehilangan dukungan

dari berbagai pihak (Nova, 2011). Seperti pada pemerintahan Soeharto, yang dipaksa berhenti di tengah jalan karena tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pendukung-pendukung lamanya di luar negeri (Galih, 2016). Polemik UU MD3 yang menambah daftar masalah pemerintahan bisa bernasib sama jika tidak ditangani dengan baik.

Kepercayaan yang diperoleh sebuah organisasi merupakan modal dasar untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan publik. Sehingga praktisi humas dituntut senantiasa mengembangkan daya sensitivitas terhadap derajat kepercayaan publik, menunjukkan sikap tanggung jawab sosial, dan mewaspadai risiko yang akan diterima bila kepercayaan itu sudah tidak ada lagi (Chatra & Nasrullah, 2008).

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content*) pada berita di media massa dengan jenis penelitian kuantitatif. Analisis isi kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan mengukur aspek-aspek tertentu berdasarkan kategorisasi dari strategi respon krisis SCCT yang dikemukakan oleh Coombs.

Objek pada penelitian ini yaitu pemberitaan mengenai revisi UU MD3 pada media *Kompas* edisi bulan Februari sampai dengan April 2018. Terdapat sebanyak 39 berita terkait revisi UU MD3 dalam kurun waktu tersebut. Penelitian ini tidak melihat pada peran media dalam kaitannya dengan krisis, tetapi lebih melihat kepada argumen yang dikemukakan oleh pemerintah dan DPR melalui berita sebagai respon mereka terhadap krisis yang terjadi.

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan temuan hasil analisis. Dalam tahap ini menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan mendeskripsikan temuan dan data yang didapat dari hasil analisis (Eriyanto, 2013). Semua berita yang terkumpul di-*coding* untuk kemudian dilakukan input atau rekap data. Proses input atau rekap data ini mencakup proses mengatur data dan mengorganisasikannya ke dalam kategorisasi yang telah ditentukan.

Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan unit sintaksis. Unit sintaksis merupakan unit analisis yang menggunakan elemen bahasa dari suatu isi, misalnya berupa kata atau kalimat. Dalam unit ini, peneliti menghitung frekuensi

dari unit bahasa yang terdapat dalam teks (Eriyanto, 2013). Validitas yang digunakan yaitu jenis validitas isi. Jenis validitas ini melihat bahwa apakah semua indikator atau kategori sudah dimasukkan ke dalam alat ukur. Sedangkan uji reliabilitas yang digunakan yaitu formula Holsti dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Reliabilitas Antar-Coder} = \frac{2M}{N1 + N2} \quad (1)$$

Keterangan:

M = jumlah *coding* yang disetujui oleh dua coder

N1 = jumlah *coding* yang dibuat *coder 1*

N2 = jumlah *coding* yang dibuat *coder 2*

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti akan menyajikan data hasil analisis yang sudah diteliti mengenai strategi respon krisis pemerintah dan DPR terhadap polemik UU MD3 dalam pemberitaan media *Kompas* edisi Februari-April 2018. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan aplikasi *Microsoft Excell* dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi untuk mempermudah memahami hasil data olahan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan teori *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dari Coombs dalam menentukan kategorisasi. Sehingga penelitian ini memiliki kategorisasi sebagai berikut.

Tabel 2. Kategorisasi

| Kategori | Strategi Respon           |
|----------|---------------------------|
| 1        | <i>Attack the accuser</i> |
| 2        | <i>Denial</i>             |
| 3        | <i>Scapegoat</i>          |
| 4        | <i>Excuse</i>             |
| 5        | <i>Justification</i>      |
| 6        | <i>Compensation</i>       |
| 7        | <i>Apology</i>            |
| 8        | <i>Reminder</i>           |
| 9        | <i>Ingratiation</i>       |
| 10       | <i>Victimage</i>          |

Sumber: (Coombs, 2007)

### 3.1.1 Validitas

Peneliti menyajikan uji validitas dari alat ukur yang telah ditentukan pada tahap ini. Uji validitas melihat apakah alat ukur yang digunakan valid (mampu mengukur dengan tepat). Validitas pada penelitian ini menggunakan jenis validitas isi. Untuk mengukur validitas isi, peneliti harus membandingkan alat ukur dengan standar yang biasa dipakai oleh komunitas ilmiah, yaitu jurnal atau buku (Eriyanto, 2013). Semakin alat ukur yang dipakai banyak digunakan dan diakui komunitas ilmiah, maka tingkat validitasnya semakin tinggi.

Penelitian ini menggunakan pengukuran berdasarkan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dalam jurnal *Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory* oleh Timothy W. Coombs (2007). Peneliti juga menggunakan buku *Public Relations: Strategies and Tactics* oleh Dennis L. Wilcox dan Glen T. Cameron (2009) di mana di dalamnya juga terdapat teori SCCT. Pengukuran dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti dengan 10 kategori, yaitu *attack the accuser*, *denial*, *scapegoat*, *excuse*, *justification*, *compensation*, *apology*, *reminder*, *ingratiation*, dan *victimage*.

Selain itu, SCCT dari Coombs juga pernah menjadi dasar penelitian Ashari, Maisha, & Samani (2017) yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian strategi respon krisis pada krisis MH370 yang diterapkan oleh Malaysian Airlines System (MAS) dengan tipe krisis yang dialami oleh organisasi. Oleh karena itu, bisa dinyatakan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh peneliti adalah valid, karena telah digunakan dan diakui oleh komunitas ilmiah.

### 3.1.2 Reliabilitas

Jika alat ukur terbukti valid, maka selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas terkait dengan apakah alat ukur dapat dipercaya menghasilkan temuan yang sama ketika dilakukan oleh orang berbeda (Eriyanto, 2013). Dalam penelitian ini, pengukuran uji reliabilitas memerlukan dua *coder*. *Coder* pertama ialah peneliti sendiri, dan *coder* kedua ialah Dhi Ajeng Ayu Putri Agustin mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014. Pada pengujian reliabilitas, tidak menyertakan semua sampel untuk diuji.



Penentuan jumlah sampel unit yang harus diuji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus:

$$n = \frac{(N-1) (SE)^2 + (PQ) (N)}{(N-1) (SE)^2 + (PQ)} \quad (2)$$

N = Jumlah populasi

SE = *Standard error*. Di mana SE adalah tingkat kesalahan dibagi nilai Z

PQ = Variasi tingkat persetujuan yang diharapkan

Populasi unit (sampel unit keseluruhan) dalam penelitian ini adalah sebanyak 39 berita, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,95 dan tingkat kesalahan 5% atau 0,05 sehingga Z memiliki nilai 1,96. Variasi tingkat persetujuan dinyatakan dalam bentuk proporsi. Proporsi dibagi ke dalam dua bagian dengan total 1. Pada penelitian ini nilai P (persetujuan) adalah 0,95 maka nilai Q adalah  $1 - 0,95 = 0,05$ . Dari hitungan rumus di atas maka diperoleh hasil sebanyak 25,109 jika dibulatkan menjadi 25. Maka, jumlah sampel unit yang digunakan untuk uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebanyak 25 artikel surat kabar. Dari jumlah sampel unit tersebut, peneliti mulai melakukan pengukuran reliabilitas pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Uji reliabilitas

| Nomor Coding | Tanggal     | Judul Berita   | Coder 1 | Coder 2 | Setuju (S) atau Tidak Setuju (TS) |
|--------------|-------------|--|---------|---------|-----------------------------------|
| 1            | 1 Feb 2018  | Revisi UU MD3 ke Paripurna Pekan Depan, Penambahan Pimpinan MPR Belum Disepakati | 5       | 5       | S                                 |
| 2            | 2 Feb 2018  | Pemerintah Belum Bisa Memutuskan   | 4       | 4       | S                                 |
| 3            | 5 Feb 2018  | DPR Belum Sepakat soal Wakil Ketua MPR   | 5       | 5       | S                                 |
| 4            | 10 Feb 2018 | Jika Revisi Disahkan, DPD Siap ke MK   | 2       | 2       | S                                 |
| 5            | 13 Feb 2018 | DPR Bangun Imunitas  | 4       | 4       | S                                 |
| 6            | 14 Feb 2018 | DPR Hambat Demokrasi   | 2       | 2       | S                                 |
| 7            | 15 Feb 2018 | DPR Membutuhkan Kritik?  | 1       | 1       | S                                 |
| 8            | 17 Feb 2018 | Penolakan Bergulir   | 2       | 5       | TS                                |
| 9            | 20 Feb 2018 | Ketua DPR: Revisi UU MD3 Bermasalah  | 7       | 4       | TS                                |
| 10           | 21 Feb 2018 | Presiden: Semua Tak Ingin Ada Penurunan Kualitas Demokrasi                       | 6       | 4       | TS                                |
| 11           | 23 Feb 2018 | Sikap Pemerintah Ditunggu  | 3       | 3       | S                                 |
| 12           | 24 Feb 2018 | Komnas HAM: Uji UU MD3 ke MK   | 3       | 3       | S                                 |
| 13           | 26 Feb 2018 | Pemerintah Melunak   | 5       | 5       | S                                 |

|   |               |  |                         |   |    |
|---|---------------|--|-------------------------|---|----|
| 14  | 28 Feb 2018   | Mencari Jalan Keluar untuk Demokrasi               | 7                       | 7 | S  |
| 15  | 3 Maret 2018  | Sikap Tegas Dinanti                                | 2                       | 2 | S  |
| 16  | 6 Maret 2018  | Presiden-DPR Perlu Cari Cara Pembatalan            | 2                       | 2 | S  |
| 17  | 14 Maret 2018 | Demokrasi Indonesia Terancam                       | 4                       | 4 | S  |
| 18  | 16 Maret 2018 | MKD Janji Tak Langgar Asas Demokrasi               | 5                       | 5 | S  |
| 19  | 19 Maret 2018 | Penambahan Diwujudkan                              | 5                       | 5 | S  |
| 20  | 20 Maret 2018 | Penambahan Picu Masalah                            | 5                       | 5 | S  |
| 21  | 22 Maret 2018 | Penyusunan UU MD3 Tak Cermat                       | 2                       | 4 | TS |
| 22  | 27 Maret 2018 | Wakil Rakyat Makin Berjarak dari Rakyat            | 5                       | 5 | S  |
| 23  | 5 April 2018  | Pansus Tawarkan Tiga Opsi Pemilihan                | 5                       | 5 | S  |
| 24  | 6 April 2018  | DPD Cari Pola yang Tepat                           | 5                       | 5 | S  |
| 25  | 12 April 2018 | Penguatan DPR Hasil Kesepakatan Bersama Pemerintah | 1                       | 2 | TS |
|   |               |  | Total S= 20 Total TS= 5 |   |    |
| Reliabilitas= $2M / (N1 + N2) = 2(20) / 25 + 25 = 0,8 (80\%)$ |               |  |                         |   |    |

Sumber: Olahan peneliti, 2018

Setelah melakukan uji reliabilitas di atas, maka dapat diketahui hasilnya adalah 0,8 atau 80%. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Itu artinya, alat ukur yang digunakan pada penelitian ini sudah bisa dikatakan reliabel karena memenuhi syarat minimum dari ketentuan formula Holsti.

### 3.1.3 Analisis Data

Langkah awal yang dilakukan pada tahap analisis data ialah mendeskripsikan temuan. Pendeskripsian temuan tersebut dilakukan dengan menjabarkan data yang didapat dari hasil analisis dalam bentuk tabel frekuensi. Adanya tabel ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembacaan hasil analisis pada sebuah penelitian (Eriyanto, 2013). Berikut ini ialah tabel frekuensi dari temuan analisis sebanyak 37 berita dengan 10 kategori dari teori SCCT.

Tabel 4. Hasil analisis respon pemerintah

| Kategori Respon Pemerintah | Tanggal          | Poin Respon  | Frekuensi | Presentase |
|----------------------------|------------------|--|-----------|------------|
| <i>Attack the accuser</i>  | 15 Februari 2018 | - Ketua DPR berkomentar menyerang pihak yang menuding bahwa pemerintah legislatif membunuh demokrasi dan antikritik. | 2         | 5%         |
|                            | 12 April 2018    | - Anggota DPR menyerang dan menilai pemohon sekedar khawatir dan menduga-duga dampak buruk dari berlakunya UU MD3.   |           |            |

|                  |                        |   |   |     |
|------------------|------------------------|---|---|-----|
| <i>Denial</i>    | 8<br>Februari<br>2018  | - Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR membantah bahwa draf revisi Pasal 245 UU MD3 tentang mekanisme pemanggilan anggota DPR bertentangan dengan putusan MK.   | 8 | 22% |
|                  | 10<br>Februari<br>2018 | - Anggota Baleg DPR membantah bahwa mekanisme pemilihan unsur pimpinan MPR baru bertentangan dengan putusan MK.   |   |     |
|                  | 14<br>Februari<br>2018 | - Ketua DPR membantah bahwa mekanisme pengesahan revisi UU MD3 tidak sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku.<br>- Ketua Baleg DPR menampik anggapan pembahasan RUU berlangsung tertutup dan tidak transparan.   |   |     |
|                  | 17<br>Februari<br>2018 | - Ketua DPR membantah bahwa Pasal 12 UU MD3 berarti DPR antikritik. Ia menegaskan DPR tetap membutuhkan kritik.   |   |     |
|                  | 18<br>Februari<br>2018 | - Anggota DPR mengatakan masyarakat tidak bisa memberikan masukan untuk mengubah revisi UU MD3 sebab sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR.  |   |     |
|                  | 3<br>Maret<br>2018     | - Ketua Baleg DPR tidak setuju jika Presiden harus memilih opsi mengeluarkan perppu. Menurutnya tidak ada unsur kepentingan yang terpenuhi untuk perppu.  |   |     |
|                  | 6<br>Maret<br>2018     | - Anggota DPR menolak usulan agar pimpinan DPR bisa segera rapat konsultasi dengan Presiden guna mencari jalan keluar untuk mencabut pengesahan revisi UU MD3.  |   |     |
|                  | 22<br>Maret<br>2018    | - MPR menolak anggapan bahwa pihaknya tidak berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait penambahan tiga wakil ketua MPR berdasarkan UU MD3 mengindikasikan UU tersebut dibuat dengan tidak cermat dan berpotensi melanggar keputusan MK. |   |     |
| <i>Scapegoat</i> | 12<br>Februari<br>2018 | - Anggota DPD menyalahkan pihak yang selama ini tidak melibatkan DPD dalam melakukan rancangan perda. Padahal seharusnya proses legislasi di daerah didampingi lembaga legislasi juga, tidak hanya mendapat asistensi dari Kementerian Dalam Negeri saja.             | 3 | 8%  |
|                  | 23<br>Februari<br>2018 | - Menkumham menyalahkan pihak yang mengusulkan tambahan pasal draf revisi UU MD3 yang awalnya hanya disepakati untuk  |   |     |

|                      |                  |  |    |     |
|----------------------|------------------|--|----|-----|
|                      |                  | menambahkan pimpinan DPR. Sehingga menambah daftar inventarisasi masalah UU MD3.   |    |     |
|                      | 24 Februari 2018 | - Menkumham menyalahkan DPR yang tidak mengindahkan peringatannya bahwa pasal-pasal tambahan UU MD3 akan berpotensi digugat di MK.   |    |     |
| <i>Excuse</i>        | 2 Februari 2018  | - Pemerintah belum bisa memberikan keputusan dengan cepat terkait penambahan kursi pimpinan dewan.<br>- Menkumham berusaha menghindari pertanyaan dan enggan memberikan konfirmasi terkait isi rapat kepada wartawan karena usai rapat memilih keluar dari pintu lain. | 4  | 11% |
|                      | 9 Februari 2018  | - Baleg menyiasati penambahan kursi pimpinan dewan sebagai kepentingan kelompok semata serta untuk mendongkrak popularitas partainya menjelang pemilihan presiden tahun 2019.  |    |     |
|                      | 13 Februari 2018 | - Ketua MK menolak berkomentar terkait munculnya norma yang menyetakan frasa “pertimbangan MKD” dalam Pasal 245 UU MD3 hasil revisi.   |    |     |
|                      | 14 Maret 2018    | - Sekretaris Kabinet menuturkan setelah aturan UU MD3 berlaku dan diundangkan, maka bukan lagi menjadi domain pemerintah ataupun DPR.  |    |     |
| <i>Justification</i> | 1 Februari 2018  | - Pemerintah membuat aturan main sebelum pemilihan pimpinan dewan dilakukan agar kegaduhan dan konflik antar lembaga tidak terulang lagi.  | 14 | 38% |
|                      | 5 Februari 2018  | - Pimpinan Baleg DPR mengadakan rencana pertemuan dengan pemerintah untuk mencari titik temu terkait mekanisme pemilihan pimpinan dewan sesuai dengan pasal revisi UU MD3.   |    |     |
|                      | 19 Februari 2018 | - DPD akan mengkaji ulang keterwakilan pimpinan DPD supaya bisa menjaga anggotanya menunaikan tugas dengan baik. Selain itu supaya DPD kembali solid, sehingga tidak ada lagi perpecahan dalam lembaga.  |    |     |
|                      | 26 Februari 2018 | - Jika ada kekurangan dan terdapat sesuatu yang tidak relevan pada isi UU MD3 saat uji materi, pemerintah akan melakukan tindakan perbaikan. Pemerintah tidak akan bersikukuh mempertahankan UU MD3 dalam sidang uji materi di Mahkamah                                |    |     |

|  |                     |   |  |  |
|--|---------------------|---|--|--|
|  |                     | Konstitusi.   |  |  |
|  | 16<br>Maret<br>2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MKD akan mengedepankan kehati-hatian dan menjunjung tinggi asas demokrasi untuk menjalankan kewenangan barunya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 atau UU MD3.</li> <li>- Ketentuan dalam tata beracara MD3 dijanjikan akan dibuat lebih detail untuk menepis kekhawatiran publik.</li> </ul> |  |  |
|  | 19<br>Maret<br>2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPD menargetkan revisi tata tertib selesai dan disahkan 3 April 2018 sehingga setelah itu pemilihan unsur Pimpinan DPD bisa langsung dilakukan.</li> </ul>   |  |  |
|  | 20<br>Maret<br>2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat gabungan pimpinan fraksi partai politik dan Dewan Perwakilan Daerah di MPR akan digelar untuk membahas polemik pembagian kursi pimpinan MPR agar tak berpotensi digugat setelah dilantiknya unsur pimpinan yang baru.</li> </ul>   |  |  |
|  | 21<br>Maret<br>2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPR akan menganggarkan dana untuk pimpinan DPR yang direlokasi dari pos yang anggarannya tidak terserah habis pada tahun 2017. Sehingga tidak meningkatkan beban anggaran negara.</li> </ul>   |  |  |
|  | 26<br>Maret<br>2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Ketua MPR yang baru akan mengoptimalkan tanggung jawab negara untuk membina kesadaran dan ketahanan ideologi bangsa, juga akan lebih banyak mendengar dan menemui masyarakat di daerah.</li> </ul>   |  |  |
|  | 27<br>Maret<br>2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPR akan menambah kekuatan dan meningkatkan kinerja melalui penambahan kursi wakil ketua untuk mengembalikan kepercayaan publik, mengurangi kesenjangan politik dan ekonomi, dan mewujudkan keadilan serta merawat keberagaman di Indonesia.</li> </ul>  |  |  |
|  | 2<br>April<br>2018  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPR akan mencari <i>win-win solution</i> dengan membentuk tim untuk membahas pergantian Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.</li> </ul>   |  |  |
|  | 3<br>April<br>2018  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPR menargetkan dalam waktu 10 hari akan ada kesepakatan setelah dilakukannya lobi-lobi terkait dengan rencana pergantian jabatan Wakil Ketua MPR.</li> </ul>  |  |  |
|  | 5<br>April<br>2018  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pansus Tata Tertib DPD menawarkan tiga opsi mekanisme pemilihan unsur pimpinan DPD untuk nanti diputuskan dalam Sidang Paripurna.</li> </ul>   |  |  |
|  | 6                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DPD masih mencari pola yang tepat</li> </ul>   |  |  |

|                     |                  |   |    |      |
|---------------------|------------------|---|----|------|
|                     | April 2018       | dalam memantau serta mengevaluasi rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah supaya tidak terlahir konflik kewenangan antar lembaga yang akan membuat bingung pemerintah daerah.   |    |      |
| <i>Compensation</i> | 21 Februari 2018 | - Presiden Joko Widodo memahami keresahan masyarakat<br>- Presiden mempersilakan masyarakat untuk mengajukan uji materi ke MK.  | 3  | 8%   |
|                     | 2 Maret 2018     | - Ketua DPR mempersilakan masyarakat untuk melakukan uji materi UU MD3 ke MK.   |    |      |
|                     | 15 Maret 2018    | - Presiden mengimbau agar masyarakat mengajukan uji materi ke MK untuk menyelesaikan masalah UU MD3.  |    |      |
| <i>Apology</i>      | 20 Februari 2018 | - Wakil Ketua Baleg DPR bersama Ketua DPR meminta maaf dan mengakui jika revisi UU MD3 bermasalah sejak awal. Ia mengakui tidak ada dialog dengan masyarakat pers sebelum revisi itu disepakati.  | 2  | 5%   |
|                     | 28 Februari 2018 | - Ketua Baleg DPR meminta maaf kepada masyarakat dan mengakui ada kelemahan dalam proses revisi UU MD3, khususnya karena menutup ruang publik untuk terlibat.   |    |      |
| <i>Reminder</i>     | 11 Februari 2018 | - Anggota Baleg DPR menilai selama ini kinerja pemerintah sangat positif sehingga partai utama pendukung Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan elektabilitas.<br>- Wakil Ketua DPR mengutarakan prestasi partai Gerindra dengan perolehan suara ketiga terbanyak pada 2014, sehingga partai tersebut layak mengisi kursi pimpinan MPR. | 1  | 3%   |
| <i>Ingratiation</i> | -                | -   | 0  | 0%   |
| <i>Victimage</i>    | -                | -   | 0  | 0%   |
| Total               |                  |   | 37 | 100% |

### 3.2 Pembahasan

Pada krisis UU MD3, kerusakan reputasi yang ditimbulkan bisa berimplikasi terhadap interaksi antara pemerintah (eksekutif dan legislatif) dengan masyarakat. Setelah krisis terjadi, masyarakat bisa jadi tidak lagi memberikan dukungan dan tidak percaya kepada keduanya. Sementara itu tanggung jawab yang diberikan ketika krisis dapat memengaruhi emosi dan perilaku pemangku kepentingan dan juga reputasi (Coombs & Holladay, 2005). Dari hasil analisis ini maka dapat diketahui sejauh mana strategi dan tanggung jawab yang diterapkan pemerintah dan DPR. Apakah sesuai dengan situasi krisis yang terjadi atau tidak.



Hasil analisis menunjukkan bahwa pemerintah maupun DPR dominan menggunakan strategi pengurangan (*diminish*), terutama pada kategori *justification* yang mencapai 38%. Pada strategi ini keduanya berupaya melakukan tindakan perbaikan untuk mengurangi kerusakan reputasi mulai dengan mencari pola dan membuat aturan yang tepat supaya tidak terlahir kembali kericuhan antarlembaga, membuat ketentuan dalam tata beracara UU MD3 lebih detil untuk menepis kekhawatiran publik, lebih mengoptimalkan kinerja unsur pimpinan dewan yang baru, dan lain sebagainya. Seperti yang ditulis Selnnow (Effiong, 2014), pengetahuan tentang tindakan korektif merupakan bentuk kepastian yang diberikan kepada para pemangku kepentingan bahwa situasi telah terkendali. Informasi yang diberikan pemerintah semacam itu dapat membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat. Pemerintah terutama DPR menggunakan strategi ini untuk menunjukkan kredibilitasnya dan meminimalkan kesan negatif dari masyarakat.

Strategi respon *diminish* dengan kategori *excuse* juga turut diterapkan pemerintah dan DPR dengan jumlah presentase 11%. Pada strategi ini keduanya mencoba meyakinkan masyarakat bahwa krisis UU MD3 ini tidak seburuk yang terlihat. Kedua lembaga tersebut juga mengisyratkan ketidakmampuannya dalam mengendalikan krisis.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, setelah aturan itu berlaku dan diundangkan, maka bukan lagi menjadi domain pemerintah ataupun DPR. (*Kompas*, 14 Maret 2018)

Respon pemerintah yang diwakili oleh Sekretaris Kabinet tersebut mengisyratkan ketidakmampuan dan seakan pemerintah tidak memiliki kendali dalam masalah ini. Hal ini sangat bertolak belakang mengingat revisi UU MD3 merupakan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dengan DPR. Apa yang dilakukan pemerintah dan DPR dalam menggagas revisi sebuah undang-undang berhasil membangun dinamika dan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat, namun pemerintah dan DPR justru memperlihatkan ketidakmampuan dan meminimalkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Strategi dominan kedua yang digunakan yaitu strategi respon krisis penolakan (*deny*). Strategi ini berusaha membangun kerangka krisis dengan mencoba menghapus keterkaitan antara organisasi dengan krisis (Coombs, 2007). Penerapan strategi jenis ini terlihat dari temuan analisis dengan hasil presentase 5% pada kategori *attack the accuser*, 22% pada kategori *denial*, dan 8% pada kategori *scapegoat*.

Taufiqulhadi meyakini aturan itu tidak bertentangan dengan putusan MK. Sebab, MK hanya melarang jika persetujuan tertulis itu dari MKD. “Lagi pula itu sebatas pertimbangan saja,” katanya. (*Kompas*, 8 Februari 2018)

Pada kutipan berita tersebut terlihat anggota Badan Legislasi DPR sedang berusaha menangkak bahwa pihaknya memiliki keterkaitan dengan krisis. Penolakan ini didasarkan dari adanya fakta bahwa draf revisi Pasal 245 UU MD3 tentang pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). DPR tetap bersikukuh mempertahankan draf revisi tersebut meskipun terbukti bahwa ketentuan itu telah dibatalkan MK. Pada 2015, MK memutuskan bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana hanya perlu persetujuan tertulis dari Presiden. Namun, pada draf revisi Pasal 245 UU MD3 yang diusulkan DPR, termaktub tidak hanya memerlukan persetujuan tertulis dari Presiden, tetapi juga memerlukan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD).

Pada respon tersebut DPR jelas sekali berupaya ingin menghindarkan pihaknya dari keterkaitan krisis. Beberapa respon lain seperti Ketua DPR yang menyerang pihak yang menuding bahwa DPR antikritik, menyerang para pemohon uji materi UU MD3 dengan menilainya bersikap berlebihan, dan Menkumham yang menyalahkan pihak pengusul tambahan pasal UU MD3, menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR lebih fokus pada siapa yang menyebabkan krisis tanpa memedulikan dampaknya bagi masyarakat. Dalam hal ini, keduanya perlu berhati-hati, karena sebenarnya penolakan tidak dibutuhkan dalam merespon krisis nyata (Coombs, 2007), seperti krisis UU MD3 ini. Strategi

komunikasi yang diterapkan pada krisis semacam ini seharusnya tidak hanya berfokus pada kepentingan dan advokasi pemerintah, namun perlu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Strategi respon selanjutnya yang diterapkan pemerintah dan DPR adalah strategi respon *rebuild* (membangun kembali). Namun, strategi ini tidak sedominan strategi respon sebelumnya, terlihat dari jumlah presentase yang hanya 8% untuk kategori *compensation* dan 5% untuk kategori *apology*. Pemerintah dan DPR sepertinya tidak terlalu fokus pada penggunaan strategi ini. Tetapi, keduanya tetap berusaha memahami kondisi psikis masyarakat dan berupaya memberikan apa yang dibutuhkan mereka begitu krisis terjadi. Hal ini terlihat dari beberapa kutipan berita berikut:

Presiden bisa memahami keresahan masyarakat. Oleh karena itu, Presiden mempersilakan masyarakat yang tak setuju dengan pengaturan yang ada dalam UU MD3 yang baru untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. “Banyak yang mengatakan, ini hukum dan etika, kok dicampur aduk. Pendapat-pendapat itu saya baca dan saya dengar di masyarakat. Saya kira semuanya tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi,” tuturnya, Rabu (21/2) di Jakarta. (*Kompas*, 21 Feburari 2018) (1)

Supratman pun mengakui ada kelemahan dalam proses revisi UU MD3. Ini khususnya karena menutup ruang publik untuk terlibat. Oleh karena itu, atas nama Baleg DPR sebagai alat kelengkapan DPR yang merumuskan revisi UU MD3, dia minta maaf kepada publik. (*Kompas*, 28 Februari 2018) (2)

Kutipan berita pertama mengisyaratkan Presiden sedang berupaya menekankan keprihatinan mental dan psikologis masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan dari krisis ini. Karena menurut Cooley & Cooley (2011), strategi *rebuild* adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi pengaruh negatif. Ekspresi perhatian yang ditunjukkan Presiden itu sendiri diupayakan

untuk membantu mengurangi dampak negatif, baik yang bisa menimpa masyarakat maupun pemerintah. Ungkapan kepedulian itu diwujudkan oleh Presiden dengan memberikan izin kepada masyarakat untuk melakukan uji materi UU MD3 ke MK.

Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah bantuan bersifat material seperti uang, barang, maupun lainnya. Masyarakat hanya membutuhkan dukungan moril dari pemerintah. Masyarakat juga membutuhkan ruang gerak dan bersuara. Dengan diberikannya izin dan mempersilakan masyarakat untuk mengajukan uji materi UU MD3, Presiden telah memberikan kepercayaan dan dukungan moril kepada masyarakat serta mengerti kebutuhan mereka selama krisis ini.

Demikian pula dengan nukilan berita kedua, permintaan maaf yang dilontarkan anggota Baleg DPR sebagai alat kelengkapan DPR merupakan bentuk keprihatinan terhadap masyarakat. Ia mengakui kesalahan pihaknya yang menyelenggarakan proses revisi UU MD3 pada ruang yang tak bisa disentuh publik, terutama masyarakat pers. Permintaan maaf bisa ditujukan untuk menumpulkan perasaan marah (Coombs & Holladay, 2005). Sehingga, respon yang dilontarkan Baleg DPR di atas merupakan strategi yang dipilih untuk menenangkan saraf dan kekhawatiran masyarakat.

Selain strategi respon utama di atas, pemerintah dan DPR juga sempat menerapkan strategi *bolstering* kendati yang dipilih hanya kategori *reminder* dengan presentase 3%, sedangkan kategori *ingratiation* dan *victimage* tidak digunakan sama sekali. Ini mengartikan bahwa pemerintah dan DPR tidak terlalu memusatkan perhatian pada reputasi selama krisis. Dari 37 artikel, hanya ditemukan 1 berita dengan setrategi respon kategori *reminder*:

Wakil Ketua Baleg DPR Arif Wibowo mengatakan, naik turunnya elektabilitas partai lebih bergantung pada kinerja pemerintah. Sebab, PDI-P adalah partai pendukung utama pemerintah dan Presiden Joko Widodo merupakan kader PDI-P. Sejauh ini, karena publik menilai kinerja

pemerintah positif, elektabilitas partai terus meningkat.  
(*Kompas*, 11 Februari 2018)

Respon tersebut bisa dibaca sebagai upaya pemerintah untuk mengingatkan masyarakat terhadap kinerja baiknya selama ini. Kinerja baik ini dibuktikan dengan adanya pengaruh terhadap elektabilitas partai pendukung pemerintah yang semakin meningkat. Strategi *bolstering* menurut Coombs (2007) membuat organisasi senantiasa memusatkan perhatian pada reputasi. Akan tetapi, sangat tidak bermoral bagi organisasi untuk memulai komunikasi krisis dengan memusatkan perhatian pada reputasi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan publik sebagai pemegang kunci kepercayaan dan dukungan kepada organisasi.

Selanjutnya, dari hasil temuan, peneliti melihat adanya ketidaksesuaian antara situasi krisis UU MD3 dengan strategi respon yang diterapkan oleh pemerintah dan DPR. Coombs (2006) dalam penelitiannya membagi situasi krisis ke dalam tiga *cluster* berikut strategi yang efektif dalam penanganannya: (1) krisis korban (organisasi menjadi korban krisis, seperti bencana alam, rumor yang berkembang, dan sebagainya), krisis jenis situasi ini akan efektif dikendalikan dengan *deny crisis response strategies*; (2) Krisis yang tidak disengaja (kecelakaan teknis, kesalahan produk, dan lainnya), krisis jenis ini efektif ditangani dengan strategi pengurangan (*diminish*); (3) krisis yang dapat dicegah (organisasi secara sadar / sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan krisis), akan efektif ditangani dengan strategi pembangunan kembali (*rebuild*).

Krisis UU MD3 yang menimpa pemerintah dan DPR masuk ke dalam jenis situasi krisis yang dapat dicegah. Draf revisi UU MD3 yang menimbulkan kontroversi dengan sadar / sengaja diusulkan dan disahkan oleh pemerintah dan DPR. Berdasarkan hasil temuan Coombs (2006), krisis semacam ini efektif dikendalikan dengan strategi *rebuild*. Akan tetapi, respon yang dilontarkan pemerintah justru lebih dominan pada strategi *diminish* dengan mencoba mengurangi hubungan antara pemerintah dan DPR dengan krisis. Padahal strategi ini lebih cocok diterapkan ketika situasi menggambarkan bahwa krisis terjadi secara tidak sengaja, seperti kecelakaan teknik, kesalahan produk, dan lainnya.

Patel & Reinsch (2013), begitu pula penelitian lain seperti yang dilakukan Ashari, Maisha, & Samani (2017), serta Resburg, Conradie, & Dondolo (2017) menyimpulkan bahwa strategi terbaik untuk situasi krisis yang dapat dicegah adalah dengan memulai program pembangunan kembali (*rebuild*) segera setelah sebuah krisis meletus. Strategi *rebuild* digunakan untuk krisis yang menghadirkan ancaman reputasi tinggi seperti krisis yang disengaja (krisis nyata). Strategi ini mengambil tindakan positif dengan menawarkan bantuan yang dibutuhkan dan meminta maaf kepada publik. Sehingga, publik merasa dipahami dan setelah itu, secara bertahap publik akan menaruh kepercayaan kembali pada organisasi. Dengan begitu, reputasi organisasi menjadi kembali aman dan terkendali (Mihaila, 2012). Namun sayang sekali, pemerintah dan DPR tidak menerapkan strategi ini sebagai fokus penyelesaian masalah pada krisis yang menyimpannya.

#### 4. PENUTUP

Dari temuan penelitian yang telah dilakukan, berdasarkan teori SCCT dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan DPR dominan menggunakan strategi *diminish* dalam merespon krisis. Hal ini bisa dilihat dari analisis dengan hasil presentase sebanyak 38% untuk kategori *justification*, dan 11% untuk kategori *excuse*. Pada strategi ini, pemerintah dan DPR sarat berpendapat bahwa krisis ini tidak seburuk yang dipikirkan masyarakat. Selain itu keduanya juga beberapa kali melontarkan respon yang menunjukkan ketidakmampuan dalam mengendalikan krisis.

Meski begitu, dominasi respon tersebut tidak sesuai untuk menangani krisis nyata seperti yang terjadi pada polemik UU MD3. Situasi krisis UU MD3 yang menimpa pemerintah dan DPR akan lebih efektif jika penanganannya menggunakan strategi *rebuild*, di mana di dalamnya termasuk kategori *compensation* dan *apology*. Kedua lembaga tersebut sebenarnya juga menerapkan strategi *rebuild*, namun tidak terlalu fokus dalam penyelesaian masalah pada krisis UU MD3 ini.

Peneliti menyadari adanya kekurangan pada penelitian ini. Peneliti hanya berfokus pada tanggung jawab organisasi selama krisis, dan tidak mengaitkannya pula dengan riwayat krisis serupa dan relasi reputasi sebagai tiga faktor dalam situasi krisis yang membentuk ancaman reputasi. Maka, saran untuk penelitian



selanjutnya agar menggunakan tiga faktor tersebut sekaligus. Kemudian saran untuk pemerintah dan DPR, diharapkan bisa memilih strategi yang lebih akomodatif dan menunjukkan kepedulian kepada masyarakat. Pemerintah bersama DPR perlu melakukan evaluasi dan secara kritis memilih strategi komunikasi yang optimal di saat krisis dengan menganalisis situasi, kejadian, dan orang-orang yang bersangkutan dengan krisis.

## **PERSANTUNAN**

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia-Nya. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Dian Purworini untuk bimbingannya selama ini; serta keluarga, teman-teman, dan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan juga dukungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ashari, N. M., Maisha, D. A., & Samani, M. C. (2017). Crisis Response Strategy and Crisis Types Suitability: A Preliminary Study on MH370. *I-COME'16*, 33, 1–8. Retrieved from [https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2017/01/shsconf\\_icone2017\\_00037/shsconf\\_icone2017\\_00037.html](https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2017/01/shsconf_icone2017_00037/shsconf_icone2017_00037.html)
- Baycu, S., & Kilinc, O. (2017). Analysis of Volkswagen Emission Crisis in the Context of Crisis Response Strategies and Newspapers Framing. *Iletisim Kuram ve Arastrima Dergisi*, 45, 45–66. Retrieved from <http://iletisimdergisi.gazi.edu.tr/site/index.php/IKAD/article/view/385%0A>
- Chatra, E., & Nasrullah, R. (2008). *Public Relation: Strategi Kehumasan dalam Menghadapi Krisis*. Bandung: Maximalis.
- Cooley, S. C., & Cooley, A. (2011). An Examination of the Situational Crisis Communication Theory Through the General Motors Bankruptcy. *Journal of Media and Communication Studies*, 3(6), 203–211. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/307855935\\_An\\_examination\\_of\\_the\\_situational\\_crisis\\_communication\\_theory\\_through\\_the\\_General\\_Motors\\_bankruptcy](https://www.researchgate.net/publication/307855935_An_examination_of_the_situational_crisis_communication_theory_through_the_General_Motors_bankruptcy)
- Coombs, W. T. (2006). The Protective Powers of Crisis Response Strategies:

- Managing Reputational Assets During a Crisis. *Journal of Promotion Management*, 12, 241–259. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/280153851\\_Coombs\\_WT\\_2006\\_The\\_protective\\_powers\\_of\\_crisis\\_response\\_strategies\\_Managing\\_reputational\\_assets\\_during\\_a\\_crisis\\_Journal\\_of\\_Promotion\\_Management\\_12\\_241-260](https://www.researchgate.net/publication/280153851_Coombs_WT_2006_The_protective_powers_of_crisis_response_strategies_Managing_reputational_assets_during_a_crisis_Journal_of_Promotion_Management_12_241-260)
- Coombs, W. T. (2007). Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis Communication Theory. *Coorporate Reputation Review*, 10(3), 163–176. Retrieved from <https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.crr.1550049>
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2005). An Exploratory Study of Stakeholder Emotions: Affect and Crises. *Research on Emotion in Organizations*, 1, 271–288. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/235299550\\_An\\_Exploratory\\_Study\\_of\\_Stakeholder\\_Emotions\\_Affect\\_and\\_Crises](https://www.researchgate.net/publication/235299550_An_Exploratory_Study_of_Stakeholder_Emotions_Affect_and_Crises)
- Effiong, A. I. (2014). Managing Reputation Risk and Situational Crisis in Higher Institutions of Learning. *Independent Journal of Management & Production*, 5(2), 458–479. Retrieved from <http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/158>
- Eriyanto. (2013). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, A. (2011). Sistem Kendali dan Strategi Penanganan (Manajemen) Krisis dalam Kajian Public Relations. *Jurnal Komunikasi*, 1(3), 279–286. Retrieved from <http://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/view/25>
- Fearn-banks, K. (2011). *Crisis Communications: A Casebook Approach, Fourth Edition*. Madison Avenue: Routledge.
- Galih, B. (2016). Cerita di Balik Mundurnya Soeharto. Retrieved September 26, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/21/10100021/Cerita.di.Balik.Mundurnya.Soeharto%0A>
- Kompas. (2018a, February 8). DPR Bangun Tameng.
- Kompas. (2018b, February 11). Di Balik Revisi UU MD3.

- Kompas. (2018c, February 21). Presiden: Semua Tak Ingin Ada Penurunan Kualitas Demokrasi.
- Kompas. (2018d, February 28). Mencari Jalan Keluar untuk Demokrasi.
- Kompas. (2018e, March 14). Demokrasi Indonesia Terancam.
- Kristanto, P. T. A. (2018, February 20). Ketua DPR: Revisi UU MD3 Bermasalah. *Kompas*.
- Kriyantono, R., Riani, Y. A., & Ika, R. (2017). Public ' s Attribution vs Punitive Behavior in Indonesian Public Relations Practice. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(1), 43–60. Retrieved from <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/jik/article/view/1180>
- Mihaila, C. N. (2012). Operative Methods for Crisis Management in Public Organizations. *Manager*, 15, 7–14. Retrieved from <https://doaj.org/article/c39052806c7241d2bcae3fd728ddb079>
- Nova, F. (2011). *Crisis Public Relations*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Patel, A., & Reinsch, L. (2013). Companies Can Apologize: Corporate Apologies and Legal Liability. *Business Communication Quarterly*, 66, 17–26. Retrieved from <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/108056990306600103>
- Puspitasari. (2016). *Komunikasi Krisis: Strategi Mengelola dan Memenangkan Citra di Mata Publik*. Jakarta: Libri.
- Resburg, A. van, Conradie, D. P., & Dondolo, H. B. (2017). The Use of the Situational Crisis Communication Theory to Study Crisis Response Strategies at A University of Technology. *Communitas*, 22(1), 62–74. Retrieved from <http://journals.ufs.ac.za/index.php/com/article/view/3293>
- Sahal, H. (2018). Kontroversi Hasil Revisi UU MD3, Ini Pandangan PBNU. Retrieved January 12, 2019, from <http://www.nu.or.id/post/read/86141/kontroversi-hasil-revisi-uu-md3-ini-pandangan-pbnu>
- Subhan, M. (2018, February 17). Monster Demokrasi. *Kompas*.
- Tobing, A. W. (2015). Demokrasi Deliberatif dalam Ruang Publik Cyber Space (Analisis Wacana Demokrasi Deliberatif dalam Ruang Publik pada Komentar Kiriman Bertema UU Pemilukada, UU MD3, dan Perseteruan

- KMP dan KIH di Grup “Diskusi Pluralisme-Lembaga Bhinneka” Facebook).  
*Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 1–10. Retrieved from  
<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/77>
- Wijayanto, T. D., & Purworini, D. (2018). Respon Pemerintah Pada Aksi Damai 411 dan 212: Analisis Isi Harian Kompas Edisi November-Desember 2016.  
*Komuniti*, 10(1), 1–25. Retrieved from  
<http://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/5477>
- Wilcox, D. L., & Cameron, G. T. (2009). *Public Relations: Strategies and Tactics* (9th ed.). Boston: Person/Allyn and Bacon.